

PERANG NGALI (PERLAWANAN RAKYAT BIMA TERHADAP PENJAJAHAN BELANDA TAHUN 1908-1909)

Rosdiana*

STKIP Taman Siswa Bima
Email: rosediana8885@gmail.com

Abstrak

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji lebih dalam mengenai latar belakang terjadinya perang Ngali di Kesultanan Bima, saat terjadinya perang, dan dampak perang Ngali di Kesultanan Bima. Penulisan ini menggunakan metode sejarah kritis melalui studi literatur. Metode yang digunakan dengan menggunakan langkah sebagai berikut. Pertama, heuristik. Kedua, kritik sumber. Ketiga, interpretasi. Keempat, penyajian dengan menyampaikan sintesa yang diperoleh dalam sebuah karya sejarah. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa perang Ngali terjadi karena beberapa sebab yaitu 1) Perasaan tidak puas terhadap tindakan pemerintah Belanda yang memberlakukan berbagai macam peraturan pajak di Kesultanan Bima. 2) Kesultanan Bima sebagai bagian dari Hindia Belanda kedaulatannya telah dirampas dengan perjanjian Lange Contract (kontrak panjang) pada tahun 1908. 3) Hukum adat dan hukum Islam diganti dengan hukum Belanda. 4) sistem bea kepala atau belasting ditolak dan dihukumkan haram membayar pajak kepada orang kafir. Perang ini terjadi dalam tiga tahap, perang Ngali tahap pertama dilakukan oleh pasukan domestik melawan laskar rakyat Ngali. Serangan tahap pertama ini dimenangkan oleh laskar rakyat Ngali dan sekaligus memberikan keuntungan kepada Belanda. Perang Ngali tahap kedua dimulai pada tanggal 19 Februari 1908. Pertempuran terjadi di sebelah selatan kampung Ngali, mulai kira-kira jam 12.00 siang dan berakhir pada jam 15.45. Serangan tahap kedua ini merupakan serangan yang gagal bagi Belanda karena laskar rakyat Ngali dapat membunuh panglima tentara Belanda. Serangan tahap ketiga dimulai pada bulan Januari tahun 1909. Serangan tahap ketiga ini, Belanda dapat memenangkan perang. Akibat kemenangan pemerintah kolonial, maka di Kesultanan Bima terjadi perubahan undang-undang dan sistem pemerintah Islam diubah menjadi sistem pemerintah Hindia-Belanda. Hal ini juga, diperparah dengan kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang menerapkan kerja paksa dan kerja rodi di Kesultanan Bima.

Kata kunci: Kesultanan Bima, sebelum meletusnya perang Ngali

Abstract

The purpose of this writing is to examine more deeply the background of the Ngali war in the Sultanate of Bima when the war occurred, and the impact of the Ngali war on the Bima Sultanate. This writing uses the method of critical history through literature studies. The method is used by using the following steps. First, heuristics. Second, source criticism. Third, interpretation. Fourth, presentation by conveying the synthesis obtained in historical work. The results of this writing indicate that the Ngali war occurred due to several reasons, namely 1) Feelings of dissatisfaction with the actions of the Dutch government which imposed various kinds of tax regulations in the Bima Sultanate. 2) The Sultanate of Bima as part of the Dutch East Indies had its sovereignty taken away by the Lange Contract (long contract) agreement in 1908. 3) Customary law and Islamic law were replaced by Dutch law. 4) the head or blasting fee system is rejected and it is forbidden to pay taxes to infidels. This war took place in three stages, the first stage of the Ngali war was carried out by domestic troops against the Ngali people's army. This first phase of the attack was won by the Ngali people's army and at the same time gave an advantage to the Dutch. The second stage of the Ngali War began on 19 February 1908. The battle took place in the south of the village of Ngali, starting at around 12.00 noon and ending at 15.45. This second phase of the attack was a failed attack for the Dutch because the Ngali people's army was able to kill the Dutch army commander. The third phase of the attack began in January 1909. In this third phase of the attack, the Netherlands won the war. As a result of the victory of the colonial government, the Sultanate of Bima changed the law, and the Islamic government system was changed to the Dutch East Indies government system. This, too, was exacerbated by the policy of the Dutch colonial government which implemented forced labor and compulsory labor in the Sultanate of Bima.

Keywords: Sultanate of Bima, before the eruption of the Ngali war

PENDAHULUAN

Pada abad ke-20 Kesultanan Bima mempunyai batas wilayah, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah barat dengan Kerajaan Dompu, di sebelah selatan dengan Laut Hindia, dan di sebelah timur dengan Selat Sape dan termasuk daerah Manggarai di bagian barat Pulau Flores (sekarang termasuk propinsi Nusa Tenggara Timur) (Mariam, 2004:103-104).

Pada permulaan abad ke-17 kerajaan-kerajaan di pulau Sumbawa, termasuk Kesultanan Bimamerupakan bagian dari wilayah kekuasaan Gowa. Sultan Abdul Khair Sirajudin, sebagai sekutu Raja Gowa ikut bagian bersama iparnya I Mallombasi Daeng Matatawang atau Sultan Hasanuddin dalam perang melawan Belanda. laskar Bima ikut terlibat dalam berbagai peperangan besar yang terjadi di Makassar. Salah satu adalah perang mempertahankan banteng Somba Opu. Sebelumnya bersama Karaeng Bontomaranu, Sulta Abdul Khair Srajudin menemui Speelman yang berakhir dengan penyerahan kekuasaan pada tanggal 4 Januari 1667.

Pada tanggal 9 Agustus dan 12 Desember 1660 terjadi perjanjian yang ditandatangani VOC dan Gowa. Perjanjian ini dilanjutkan dengan perjanjian pada tanggal 18 November 1667 yang terdiri dari 20 pasal, empat pasal yang menyangkut wilayah Kesultanan Bima. Kesepakatan tersebut baru ditandatangani oleh Kesultanan Bima pada tanggal 8 Desember 1669 dalam suatu perjanjian di Batavia oleh Jeneli Monta Abdul Wahib dan Jeneli La Ibu atas nama Sultan Bima (Tayib, 1995:132-137).

Sebelum abad ke-20, perjuangan melawan penjajah di Kesultanan Bima selalu berpusat di istana di bawah pimpinan sultan dan ulama sebagai pejabat kesultanan. Tetapi sejak awal abad ke-20, pusat perjuangan beralih ke desa yang dipimpin oleh para tokoh yang mewakili berbagai kelompok sosial. Pada saat itu sultan dan ulama istana berada dalam posisi yang sulit

dan serba salah karena pemerintah sudah terikat dengan isi perjanjian *Lange Contract* (kontrak panjang) yang dipaksakan oleh Belanda. Memasuki abad ke-20, kedudukan Belanda di bidang politik dan ekonomi di seluruh wilayah Nusantara bertambah kuat. Perlawanan rakyat yang dipimpin oleh sultan, ulama dan tokoh non formal dapat dilumpuhkan. Perjuangan rakyat Aceh yang sangat ditakuti Belanda pun, mulai tahun 1905 sudah mulai lemah (Suyono, 2003:313-314).

Pada awal abad ke-20, Bima menghadapi berbagai tantangan terutama di bidang ekonomi dan politik pemerintah. Kebebasan dagang sebelumnya menjadi pilar utama ekonomi terancam dengan adanya monopoli dagang Belanda. Kedaulatan dan keutuhan wilayah terancam oleh perjanjian *Lange Contract* (kontrak panjang) yang telah dipaksakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Keteringgalan di bidang IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi) merupakan faktor utama. Satu-satunya kekuatan yang dimiliki ialah ketaatan pada agama. Rangkaian permasalahan tersebut bukan hanya dihadapi oleh Kesultanan Bima, tetapi oleh semua kerajaan atau Kesultanan di seluruh Nusantara pada periode tersebut (Ismail, 2003:23-24).

Permasalah-permasalahan tersebut baru benar-benar dirasakan menjadi tantangan berat pada masa pemerintah Sultan Abdullah, Sultan Abdul Azis yang titik puncaknya pada masa pemerintah Sultan Ibrahim. Permasalah lain yang cukup merepotkan Sultan Ibrahim ialah Bima tidak lagi memiliki angkatan laut karena sudah dibubarkan oleh Sultan Abdullah. Pertimbangan pembubaran angkatan laut tersebut dikarenakan takut diperalat oleh Belanda untuk menyerang pejuang Makassar sesuai dengan isi kontrak dagang yang ditanda tangani pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid.

Pengaruh Belanda muncul dengan adanya perjanjian *Lange Contract* (kontrak panjang) yang mengikat Bima dalam berbagai peraturan

perundang-undangan pemerintah Hindia-Belanda. Perjanjian *Lange Contract* (kontrak panjang) dengan Belanda tersebut membuat kemarahan rakyat meluap. Kemarahan itu diwujudkan dengan adanya perlawanan rakyat Bima yang menjalar di tiga tempat, yaitu perang Ngali, Dena dan Kala. Perlawanan tersebut merupakan wujud dari sebuah penjajahan langsung oleh Belanda terhadap Kesultanan Bima. Hal ini menyadarkan Belanda bahwa Islam di manapun tidak bisa dijajah dengan mudah karena Islam memiliki pengaruh yang besar dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat Bima.

Perang Ngali merupakan gejala sosial, agama, ekonomi, dan politik yang terjadi karena adanya rongrongan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Perang Ngali merupakan peristiwa lokal atau sebuah sejarah lokal yang memiliki berbagai dimensi permasalahan. Perang tersebut dikatakan sebagai sebuah sejarah konvensional atau sejarah desa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian historis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji, menganalisis serta perbandingan secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau sedangkan rekonstruksi dengan menempuh proses historiografi atau penulisan sejarah.

Metode sejarah terdiri dari empat langkah, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Tahap heuristik adalah kegiatan untuk mencari dan menemukan jejak sejarah. Langkah heuristik dilaksanakan dengan mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan judul penelitian. Buku yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Kesultanan Bima dan Keberadaannya, Penulis Abdullah Ahmad. (2) Hukum Adat Undang-undangn Bandar Bima, Penulis Siti Mariam Salahuddin (3) Peradilan Agama dalam Pemerintahan Islam di Kesultanan

Bima (1947-1957), Penulis Abdul Gani Abdullah. (4) Sejarah Dana Mbojo Bima, Penulis Abdullah Tayib. (5) ParaTokoh Sejarah Lokal Bima dan Riwayat Perjuangannya, Penulis Hilir Ismail. (6) Peran Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara, Penulis Hilir Ismail. (7) Kerajaan Tradisional di Indonesia: Bima, Penulis Tawalinuddin Haris.

Tahap kedua adalah kritik sumber. Kritik sumber yaitu kegiatan meneliti untuk menentukan validitas dan reliabilitas suatu sumber sejarah yang berhasil dikumpulkan. Kritik terbagi menjadi 2 yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Tahap ketiga adalah interpretasi atau penafsiran. Interpretasi terdiri dari analisis dan sintesis. Analisis adalah menguraikan data-data yang diperoleh, sedangkan sintesis berarti menyatukan data-data sehingga ditemukan fakta sejarah (Rahman, 2006:68). Fakta disusun secara kronologis dan membentuk fakta rasional dan faktual berdasarkan pada aspek pembahasan. Tahap keempat adalah historiografi atau penyajian. Historiografi yaitu penyajian hasil penelitian sejarah dengan melewati tahap-tahap di atas dalam bentuk karya sejarah (Hugiono & Poerwantana, 1992: 26). Dalam tahap ini penulis menyajikan dalam bentuk jurnal ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ngali adalah sebuah desa yang berada di sebelah selatan kota Bima tepatnya adalah di distrik Belo. Ngali merupakan sebuah desa yang berada di tengah pergunungan. Ngali pada waktu itu merupakan sebuah kampung yang dipimpin oleh seorang Galarang. Di sebelah timur desa tersebut terdapat gunung Kabuju dan terdapat satu pohon besar. Di sebelah selatan terdapat gunung Tonggondoa. Di sebelah utara agak ke timur terdapat gunung yang berbatasan langsung dengan Monta atau Tolo Monta (Jurdin, 2006:211).

Posisi desa yang diapit oleh gunung semacam di atas, tentu akan berimplikasi pada

pembentukan watak. Posisi tersebut membentuk suatu masyarakat yang cenderung tertutup. Meski muncul penilaian demikian, desa Ngali merupakan suatu wilayah yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat Bima. Dari dekat, masyarakat desa ini kelihatan cukup terbuka warganya ramah dan sopan, tetapi kalau dilihat dari sudut desanya tampak tertutup.

Jika dilacak lebih lanjut, desa Ngali telah dihuni oleh manusia sebelum Kesultanan Bima terbentuk yang dikenal dengan Ncuhi atau Dalu. Bukti dari hal tersebut adalah bahwa antara Ngali dan Renda terdapat suatu prasasti yang dikenal dengan Wadu Nocu. Bukti ini sulit terbantah karena sejarah kebudayaan masyarakat Bima tetap memasukkan Wadu Nocu sebagai bukti sejarah bahwa masyarakat telah ada sebelum Bima terbentuk. Bukti lain dengan adanya Wadu Tunti dan Wadu Pa'a di sebelah utara desa Ngali.

Masyarakat Ngali yang hidup lebih dekat dengan Wadu Nocu bersama dengan masyarakat Renda telah ada sebelum berdirinya Kesultanan Bima. Sejarah yang paling dikenal luas tentang masyarakat Ngali adalah ketika masyarakat Ngali memberikan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Pada waktu itu Galarang Ngali Salasa Ompu Kapa'a bersama dengan Galarang Rasa Nggaro, Kala Donggo, Dena Bolo menyatakan tekad untuk melawan kolonialisme Belanda. Kaum penjajah telah menaklukkan kekuatan Kesultanan Bima yang ketika itu dipimpin oleh Sultan Ibrahim tetapi sebagian rakyat Bima terutama tiga desa yang digerakkan oleh Ngali memberikan perlawanan yang hebat atas keinginan Belanda untuk menarik pajak hasil bumi rakyat Bima. Semangat yang digelorakan oleh rakyat Ngali adalah melawan kaum kafir penjajah dengan mengumndangkan takbir di mesjid Raya Ngali.

Sebab Perang Ngali Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perang Ngali adalah sebagai berikut: 1) Perasaan tidak puas terhadap tindakan pemerintah Kolonial Belanda yang memberlakukan berbagai macam peraturan

pajak di Kesultanan Bima sehingga rakyat Bima menderita. Tindakan tersebut mendapat perlawanan dari kelompok Ma Kalosa Weki. 2) Kesultanan Bima sebagai bagian dari Hindia Belanda kedaulatannya telah dirampas dengan perjanjian pada tahun 1907 dan dilanjutkan dengan perjanjian *Lange Contract* (kontrak panjang) pada tahun 1908. 3) Hukum adat dan hukum Islam diganti dengan hukum Belanda sehingga tidak dapat diterima oleh para ulama, pemuka masyarakat dan rakyat Bima pada umumnya. 4) Sistem bea kepala atau belasting ditolak dan dihukumkan haram harus membayar pajak kepada orang kafir (Tayib, 1995:261).

Jalannya Perang Ngali 1, dimulai dengan mobilisasi massa. Berdasarkan hasil rapat di Palibelo dan Pali Pena antara Sultan Ibrahim dengan Galarang yang terdapat di Kejenelian Kesultanan Bima, maka mereka membulatkan tekad melawan kolonial Belanda. Melihat situasi inilah maka Galarang Salasa Ompu Kapa'a, ulama, pemuka masyarakat dan golongan bangsawan melakukan musyawarah bersama yang diadakan di Masjid Raya desa Ngali (Tayib, 1995:261). Pertemuan ini membicarakan berbagai resiko yang telah diambil untuk menghadapi kekuatan Belanda yang mungkin akan menyerang mereka dari utara dan barat. Tokoh-tokoh tersebut melakukan penggalangan kekuatan massa diberbagai desa sehingga terkumpulah beribu-ribu orang yang siap melawan Belanda. Massa tersebut bukan saja berasal dari desa Ngali tetapi dari desa-desa lain dalam Kejenelian Belo, antara lain dari desa Renda, Roi, Roka, Ncera dan Lido (Djakariah, 1991:50).

Salah satu tokoh perang Ngali adalah Abbas Daeng Manasa, yang berperan sebagai panglima perang dan dibantu oleh para ulama-ulama yang tidak mau tunduk kepada orang kafir (Belanda). Ulama-ulama yang merupakan anggota pasukan perang Ngali ialah: Hadji Said, Hadji Yasin dan Syekh Bagdad (keturunan Arab).

Para ulama menyerukan kepada rakyat agar serentak melawan orang kafir. Menurut mereka orang Islam haram tunduk kepada orang kafir. Di dalam buku Sunda kecil dengan jelas menguraikan perang Ngali sebagai berikut: Rakyat menganggap “haram” menerima dan tunduk di bawah perintah orang kafir. Dalam tahun ini timbullah pemberontakan di daerah Kesultanan Bima dibawah pimpinan seorang keturunan bangsawan. Pemberontakan ini dikenal dengan nama “perang Ngali”. Pelopor itu adalah bernama Abbas, putra Abubakar Daeng Manasa, lahir dan diam di kampung Nata distrik Belo (Hilir Ismail, 1975:55-56). Setelah massa tersebut berkumpul di Masjid Raya Ngali, maka pemimpin perang Ngali dan para ulama memberikan penjelasan kepada rakyat Bima bahwa perang melawan Belanda atau kafir penjajah itu hukumnya wajib dalam ajaran Islam. Bila melalui Jihad Fii Sabilillah.

Para tokoh-tokoh Perang Ngali diatas bersama-sama memimpin massa untuk melakukan takbir dan tahlil sebagai tanda dimulainya perang sabil melawan imperialisme Belanda. Massa tersebut mengelilingi desa dengan suara takbir sambil membawa bendera putih sebagai lambang kesucian. Ayat Al-Qur’an digemakan, sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW melawan kaum kafir Mekkah pada waktu itu dikisahkan kembali. Selama tiga hari tiga malam mereka mengadakan takbir keliling desa sebagai tanda dimulainya perang sabil melawan pemerintah Belanda. Takbir dan tahlil inilah mereka gunakan membangkitkan semangat rakyat dengan semboyan menerima Belanda berarti dijajah, dijajah Belanda berarti kafir, berperang dengan kafir berarti sabil. Mereka semua bertekad untuk mati syahid di jalan Allah (Depdikbud, 1978:44).

Melihat situasi di atas, Sultan Ibrahim mengirim utusan untuk menyampaikan berita bahwa pemerintah Belanda akan menyerang mereka. Mendengar berita tersebut, bukan ketakutan diperlihatkan oleh massa, melainkan

bersiap-siap menunggu serangan dari pasukan Belanda. Pada saat inilah massa di Ngali tengah mempersenjatai dirinya dengan senjata tajam seperti tombak, keris, pedang, dan benda tajam lainnya serta ada beberapa pucuk senjata sederhana lainnya. Seiring dengan perkembangan dan persiapan perang di desa Ngali, pemerintah Belanda merealisasikan politik adu domba di Kesultanan Bima dengan membentuk pasukan domestik atau pasukan kerajaan yang akan menghukum laskar rakyat Ngali berani melawan Sultan Ibrahim. Pasukan tersebut dibentuk dengan dalih menegakkan wibawa sultan. Walaupun tujuan akhirnya untuk kepentingan Belanda karena melalui mereka Belanda dapat mengetahui besarnya kekuatan laskar rakyat Ngali (Tayib, 1995:263).

Strategi Perang Ngali Serangan ke desa Ngali dilakukan oleh Belanda dalam tiga tahap. Serangan tahap Pertama dilakukan oleh pasukan domestik. Pasukan ini dijadikan pelopor selaku kelinci percobaan untuk memperoleh informasi dan mengukur kekuatan laskar rakyat Ngali. Serangan dilakukan dari dua sektor yaitu sektor barat dan sektor utara (Ahmad, 1992:100). Pada sektor barat ini ditugaskan pada pasukan domestik dari Bugis Sape yang dipimpin oleh Matoa Haji Sultan dengan membawa bendera kuning. Sektor barat ini membuka serangan menjelang sore hari, sesudah menyeberangi sungai Ncera. Sementara itu, pihak laskar Ngali telah membuat pertahanan bersembunyi di semak belukar yang ada di seberang sungai. Strategi tersebut dilakukan oleh laskar rakyat Ngali agar dapat menyergap pasukan Bugis Sape yang datang dari arah sungai Ncera, sehingga terjadi kontak senjata jarak dekat antara kedua kekuatan. Dalam serangan ini, banyak pasukan Bugis Sape yang tewas ditangan laskar rakyat Ngali, sedangkan yang masih hidup bergerak mundur ke Sakuru. Dua kekuatan bersaudara tersebut saling membunuh agar memperoleh kemenangan (Djakariah, 1995:2).

Serangan sektor utara melalui desa Renda langsung ditujukan pada sasaran desa Ngali. Pasukan domestik dari Rasanae ini dipimpin oleh Ama Je dengan membawa bendera hijau. Sektor utara ini tidak berani membuka serangan setelah penghubung memberikan informasi bahwa sektor barat dapat dipatahkan. Serangan pertama yang telah dilakukan oleh pasukan domestik di atas secara fisik gagal, namun dalam fungsinya dapat memberikan keuntungan besar kepada pihak Belanda. Melalui mereka ini Belanda dapat mengetahui kekuatan dan persenjataan laskar rakyat Ngali serta mengetahui tingkat semangat juangnya (Ismail, 1975:40).

Kemenangan laskar rakyat Ngali atas serangan pertama tersebut telah membangkitkan rasa percaya diri dan sekaligus meningkatkan semangat juang rakyat Ngali. Mendengar kemenangan rakyat Ngali tersebut, maka pada tanggal 16 Febuari 1908 Gubernur Militer Swart di Makassar mengirimkan bantuan tiga briigade tentara Belanda untuk melawan laskar rakyat Bima. Mereka tiba di Bima sekitar jam 07.00 pagi pada tanggal 17 Febuari 1908.

Keesokan harinya dua brigade pasukan Belanda dari Kendari tiba di Bima dengan menumpang kapal DOG. Sedangkan rombongan ketiga brigade Belanda menumpang kapal KPM "BOTH" dipimpin oleh Swart. Pasukan itu masih ditambah dengan pasukan marinir yang dipimpin oleh kelas satu Pieren dengan menumpang kapal Siboga. Tentara Belanda ini setelah tiba di Bima di asramakan di kampung Benteng (Sjamsuddin, 1982:4).

Brigade tersebut di bawah komando Lettu J.H.C. Vastenou dan Peltu. M. Schoute. Pasukan marsose Belanda diberangkatkan ke Tente dan memilih bukit Kalate Tente sebagai markas operasi. Dipilihnya tempat ini karena letaknya yang strategis dan berada di ketinggian \pm 200 m serta jaraknya \pm 5 km dari desa Ngali. Dari tempat ini Belanda dapat melihat desa Ngali dengan menggunakan bantuan alat teropong (Tayib, 1975:265).

Pada tanggal 19 Febuari 1908, pasukan Belanda berangkat dari Bima menuju Ngali dan menggempur Desa Ngali dari dua jurusan. Arah barat dipimpin oleh Swart A.A Banse dan J.H.C Vastenou dengan melewati Desa Tente, Sakuru, Baralau menuju Ngali. Arah utara dipimpin oleh M. Schoute melewati desa Nata, Roi, Roka melewati sekitar monumen perang Ngali sekarang. Sementara itu tiap-tiap pintu kampung Ngali dijaga oleh rakyat dengan pakaian serba putih bersenjatakan tombak, keris, pedang, parang dan sebagian lagi bersenjatakan pistol dan sanapan.

Bagi rakyat Ngali pakaian putih berarti siap sedia mati syahid melawan Belanda yang bersenjata lengkap. Melihat situasi yang demikian pasukan Belanda mencari strategi sebelum melakukan penyerbuan. Bagi rakyat keadaan dan situasiNgali sudah sangat dipahami. Tetapi bagaimana pun beraninya rakyat, Belanda bukanlah tandingannya dalam pengalaman berperang (Ismail, 2002:50- 51).

Pertempuran sengitdisertai hujan lebat terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Febuari 1908 bertepatan pada tanggal 16 M, 1326 H, saat permulaan musim tanam padi. Pertempuran berlangsung sekitar jam 12.00 siang di sebelah selatan kampung Ngali. Para pejuang Ngali maju menyongsong musuh dengan melepaskan tembakan-tembakkan. Setelah melalui pertempuran sengit akhirnya pertempuran selesai pada jam 15.45.

Dalam pertempuran ini kedua belah pihak menderita kerugian. Beratus-ratus orang tewas termasuk Lettu Vaternoutewas tertusuk tombak. Mayat-mayat tentara Belanda dikubur di Ngali, kecuali mayat Komando Vasternoudi bawah ke Makassar untuk dikubur disana. Di pihak rakyat Ngali gugur seorang pemimpin pasukannya yaitu Salasa Ompu Kapa'a (Galarang Ngali). Dengan meninggalnya Salasa Ompu Kapa'a sebagai pimpinan laskar, maka pimpinan laskar rakyat digantikan oleh Haji Yasin.

Serangan kedua dilakukan Belanda di atas dinyatakan sebagai serangan yang sangat gagal, karena menurut Belanda laskar-laskar rakyat Ngali dapat mempertahankan diri dan membunuh panglima tentara Belanda Letnan Vasternou. Serdadu Belanda mengosongkan benteng di Kalate Tente. Sementara Laskar Ngali mendapat bantuan dari Kejenelian Bolo, Donggo, dan Kae. Mereka menggabungkan diri untuk mengejar Belanda yang mundur menyelamatkan diri ke pantai. Pengejaran tidak dapat dilakukan siang hari karena pihak Belanda berlindung dibalik meriam kapal perang mereka. Pada malam hari tanggal 6 Desember 1908 dilakukan penyerangan secara mendadak terhadap tentara Belanda di tepi pantai Bima. Penyerangan ini membuat Belanda panik sehingga meriam-meriam kapal mereka tidak dapat digunakan karena keadaangulita. Penyerangan ini menimbulkan banyak korban dari pihak Belanda (Ismail, 1989:34). Karena kekalahan tersebut, maka Gubernur Jenderal Belanda meminta bantuan residen Michael di Makassar.

Residen menyiapkan serdadu-serdadu yang didatangkan dari Ambon, Medan dan Bugis sebanyak 3 kapal perang dengan 1800 orang serdadu yang berlayar menuju Bima. Pasukan yang dipimpin oleh Overste de Brouw tiba di pantai Bima pada tanggal 7 Januari 1909. Setelah panglima tersebut tiba di Bima, ia mengirim utusan kepada Sultan Ibrahim agar menyiapkan pasukan untuk membantu Belanda. Kemudian Sultan Ibrahim membantu dengan pasukan domestik yang berjumlah 300 orang serta logistik yang diperlukan untuk memenangkan perang.

Pada penyerangan ketiga ini Belanda membuat perhitungan yang baik dengan menggunakan taktik perang yang cukup matang agar dapat mengalahkan kekuatan laskar rakyat. Belanda melakukan serangan melalui darat keseluruhan. Sebagian bergerak dari Benteng Pabean melewati Ama Hami dan melintasi jalan raya pinggir laut hingga Panda

yang ditempuh sekitar 15 Km. Sebagian jalan kaki lewat Lewamori terus melintasi Palibelo dan di sini pasukan Belanda bersatu kembali. Setelah pasukan Belanda membuat kubu pertahanan di sebelah barat Ngali, tepatnya di Tolo Monta. Pasukan Belanda yang melintasi arah utara membuat kubu pertahanan di sebelah utara Ngali yaitu di desa Renda. Sementara itu Laskar rakyat Ngali tetap bertahan di dalam desa Ngali dan sebagian bertahan di Tolo Monta dengan tujuan agar dapat menyerang pasukan Belanda (Djakariah, 1995:20).

Setelah melihat bahwa Belanda menggunakan dua arah untuk menyerang laskar rakyat yaitu dari utara dan barat, maka pimpinan laskar Haji Muhammad Said Abu Talu menugaskan Haji Yassin Abu Iye untuk menghalau serangan Belanda yang datang dari utara Ngali yang bermarkas di Renda. Haji Muhammad Abu Talu memimpin laskar rakyat Ngali di bagian barat. Sementara itu sebagian laskar rakyat memasuki kolong rumah untuk bersembunyi, tujuannya ialah bila serdadu Belanda melewati samping rumah, maka pagar rumah akan dirobohkan ke luar hingga menimpa serdadu Belanda. Laskar melakukan serangan dari arah belakang setelah pasukan Belanda maju. Dalam serangan ini banyak serdadu Belanda yang terbunuh di tangan laskar. Taktik perang laskar Ngali sangat baik, meskipun belum sepenuhnya mampu mengalahkan taktik perang serdadu Belanda yang professional (Amin, 1971:26).

Melihat taktik kekuatan laskar yang begitu lihai dan cerdas, pihak Belanda menyadari bahwa taktik perang mereka harus dirubah, karena banyak rakyat bersembunyi dikolong-kolong rumah, maka pihak Belanda menerapkan siasat baru dengan membakar rumah warga sehingga menimbulkan banyak korban. Belanda melakukan serangan dari arah utara dan barat Ngali dan bertemu di tengah desa Ngali sehingga menimbulkan banyak korban anak-anak dan perempuan ditangkap. Melihat kondisi ini, laskar

rakyat menurun semangatnya untuk memberikan perlawanan. Pada waktu laskar mendekati anak-anak dan kaum wanita yang ditawan Belanda tersebut, sebagian laskar terbunuh, karena ditembak oleh Belanda dari arah Belakang sehingga akhirnya pertempuran mereda (Ahmad, 1992:267-268).

Serangan tahap ketiga ini menimbulkan banyak korban dari kedua belah pihak. Di Pihak rakyat Ngali telah gugur pemimpin-pemimpin pasukannya yaitu Haji Muhammad dan Sulaiman Ama Je dan dipihak Belanda banyak pasukan yang meninggal. Berakhirnya perang tahap ketiga ini membuat kondisi Ngali hancur berantakan. Desa Ngali telah rata dengan tanah dan rakyat banyak yang mengungsi ke luar desa (Ahmad, 1992:269).

Akhir Perang Ngali Perlawanan laskar rakyat Ngali dapat dipatahkan oleh Belanda dengan tipu muslihat dan siasat kotor yaitu dengan memeralat Sultan Ibrahim. Perang Ngali telah berakhir dengan kemenangan di tangan serdadu Belanda, sehingga cita-cita Belanda yang dituangkan dalam perjanjian *Lange Contract* (kontrak panjang) bisa mulai direalisasikan di Kesultanan Bima (Dzakariah, 1995:30) dengan kemenangan tersebut, serdadu Belanda sangat bahagia terutama Gubernur Jenderalnya di Batavia yang menerima berita kemenangan tersebut, bahwa pada tanggal 20 Januari 1909 Kesultanan Bima telah ditaklukkan.

Pada tanggal 21 Januari 1909 pihak Belanda merayakan kemenangan tersebut dengan meletuskan meriam 25 kali. Kemenangan tersebut menjadi sebuah kemenangan yang sangat menguntungkan pihak Belanda (Jurdin, 2006:218). Setelah perang Ngali di Kesultanan Bima berakhir, maka para pemimpin perang Ngali yang masih hidup, antara lain Haji Muhammad Said Abu Talu dan Haji Yasin ditangkap oleh serdadu Belanda dan dihadapkan kepada Sultan. Mereka ini masing-masing dihukum membayar denda 70 ekor kerbau jantan. Jika ditinjau dari ketentuan yang berlaku di

Kesultanan Bima, seorang yang melakukan pembangkangan terhadap pemerintah akan dihukum mati atau hukuman buang seumur hidup. Dalam kenyataannya ketentuan hukum tersebut tidak diberlakukan terhadap para tokoh yang terlibat dalam perang melawan Belanda. Sultan menganggap bahwa perlawanan rakyat di Ngali bukan melawan Kesultanan Bima, tetapi melawan pemerintah kolonial Belanda (Ismail, 2004:152).

Perlawanan rakyat tersebut tetap memberikan beban kepada rakyat yaitu pajak dan kerja rodi. Selain itu, dikeluarkan juga keputusan bahwa tokoh perang Ngali tidak diperkenankan tinggal di desa-desa lagi, untuk mencegah terjadi perlawanan yang serupa di kemudian hari. Mereka ini harus tinggal disekeliling Sultan. Bagi rakyat Bima meskipun perlawanan dapat ditindas dengan kejam, namun hal itu tidak menimbulkan penyesalan dan ketakutan malah merasa bangga terhadap Negara Bima (dulu) dan agama yang mereka cintai.

Dampak Perang Ngali di Kesultanan Bima 1. Kondisi Politik Berakhirnya perang Ngali menjadi awal berdirinya pemerintah kolonial Belanda di wilayah Kesultanan Bima. Pemerintah yang diterapkan oleh pemerintah Kolonial Belanda di Kesultanan Bima adalah *Zelbestuur*. *Zelbestuur* merupakan pemerintah tidak langsung yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan cara memberikan hak otonom kepada Sultan Bima, namun tetap di bawah pengawasan pemerintah Belanda (Depdikbud, 1978:141) Cengkraman kekuasaan pemerintah Kolonial Belanda mulai diangkat kepermukaan setelah mereka mendapat kemenangan atas gerakan perlawanan laskar Ngali di sebuah desa di Kesultanan Bima.

Sejak saat itu pula Belanda mulai menerapkan konsep politik pemerintah kolonialnya dalam pemerintah Kesultanan Bima. Pelaksanaan sistem pemerintah kolonial membawa akibat bagi perubahan organisasi pemerintah Kesultanan Bima. Perubahan

dilakukan dengan mengurangi dan menghilangkan kekuasaan serta kewenangan tertentu dari perangkat hukum pemerintah di Kesultanan Bima (Tayeb, 1995:276). Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Belanda adalah dengan memperketat pengawasan atas Kesultanan Bima.

Adapun struktur-struktur pemerintahan dan tata hukum yang diubah dan diatur oleh pemerintah Belanda, sebagai berikut: Komponen Majelis Hadat yang beranggotakan 12 orang dikurangi hingga menjadi dua orang saja, yaitu Sultan dan Ruma Bicara, Kekuasaan Majelis Hadat dipersempit hanya mengurus badan peradilan kerajaan yang berpedoman pada hukum Hindia-Belanda, Kekuasaan Majelis Tureli sebagai badan harian pemerintahan Kesultanan ditekan sedemikian rupa hingga mencapai titik pembekuan perangkatnya dan diganti dengan Dewan Pemerintahan Belanda, dan Majelis Mahkamah Syar'iyah dihapus dan diganti dengan peradilan Hindia-Belanda (Landraad), tujuannya untuk menghalangi orang Bima akrab dengan pelaksanaan hukum Islam, dan berusaha menghilangkan sendi-sendi hukum Islam dalam kehidupan pemerintah Kesultanan Bima.

Dalam struktur birokrasi wibawa Sultan Bima disamakan dengan pemimpin kepala kejenelian atau distrik lainnya. Berdasarkan struktur tersebut Bima dibagi menjadi lima distrik, yaitu: Distrik Rasanae, Distrik Sape, Distrik Bolo, Distrik Belo dan Distrik Donggo. Dalam menjalankan kewajiban pemerintahan bestur di masing-masing distrik di Kesultanan Bima diserahkan tanggung jawab kepada Jeneli (Hopdistrik) dan pembantu onderdistrik serta galarang-galarang dan kepala kampung.

Kondisi dalam Bidang Sosial-Ekonomi Perang Ngali telah merenggut jiwa terbaik desa pada zamannya. Perang ini juga menimbulkan pengorbanan yang besar baik moril maupun material. Setelah perang Ngali berakhir, maka pemerintah Belanda dengan leluas menerapkan

sistem belasting. Kerja paksa dan kerja rodi diterapkan dengan menggunakan istilah manis didengar, namun pahit dirasakan, yaitu herendienst (kerja rodi untuk keperluan tuan tanah) dan kerja hamente (kerja rodi bagi rakyat yang tidak mampu membayar belasting dengan membawa bekal kehidupan sehari) (Djakarah, 1995:2).

Penerapan kerja paksa dan kerja rodi tersebut, mengakibatkan rakyat di Kesultanan Bima semakin menderita. Kondisi rakyat Bima pada waktu itu 0.02,5 sehari mana mungkin dapat membayar pajak belasting yang diterapkan f 2,50 perorang dewasa dalam setahun. Untuk mencukupi kebutuhan keluarga dicukupkan sebenggol dan banyak pula yang berpuasa senin-kamis. Hampir seluruh masyarakat Bima tidak pernah menggenggam uang dengan nominal satu ketip (f 0,10) apalagi uang rupiah dan ringgit (f 1 dan f 2,50). Rakyat Bima mengetahui pecahan mata uang rimis, sen, gobang, kelip, ketip, rupiah dan uang mas melalui mata pelajaran berhitung di sekolah desa untuk pengetahuan berhitung (Abdullah Tayib, 1995:287).

Kondisi dalam Bidang Agama Setelah mendapat kemenangan atas perang Ngali, pemerintah Belanda mulai menerapkan hukum pemerintah Kolonial Belanda di Kesultanan Bima. Pada saat itu mulai dilakukan penghapusan terhadap hukum Islam atau Mahkamah Syar'iyah di Kesultanan Bima. Akibat penghapusan Mahkamah Syar'iyah ini, maka sejak tahun 1908 itu pula mulai terjadi kekosongan secara institusional peradilan agama di Bima. Kekosongan peradilan ini antara lain sebagai berikut: a) Lepasnya keberadaan Mahkamah Syar'iyah dari ikatan hukum masyarakat Bima sehingga menghambat penegakan hukum Islam, b) Timbulnya kasus dan sengketa hukum dalam masyarakat yang menuntut dalam masyarakat penyelesaian oleh suatu majelis pengadilan agama (Abdullah, 2004: 85).

Pada saat itulah hukum Islam di Kesultanan Bima mengalami perubahan-perubahan seperti masalah yang berkaitan dengan perkara pidana. Mengenai putusan yang diancam dengan hukuman mati, hukum potong tangan, dan hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana perkosaan mulai saat itu dialihkan atau ditugaskan kepada majelis Rapat Besar, Rapat Tengah, dan Rapat Rendah. Majelis ini merupakan pengadilan yang sengaja dibuat oleh pemerintah Kolonial Belanda menggantikan hukum Islam di Kesultanan Bima agar hukum Islam dijauhkan dalam kehidupan rakyat Bima. Keadaan ini berlangsung sampai masa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 dan berlanjut hingga pembentukan Badan Hukum Syara pada tahun 1947. Kekosongan lembaga peradilan agama ini berarti terjadi kekosongan penegakan hukum Islam di Kesultanan Bima sehingga terjadi penumpukan kasus dan sengketa hukum masyarakat Bima (Depdikbud, 1978:141).

Kasus-kasus yang terjadi di Kesultana Bima pada waktu itu adalah yang berkaitan dengan kewajiban membayar pajak, zakat, pengajian Qur'an, statu hukum barang wakaf dan pembagian harta warisan. Masalah ini telah bergeser kearah yang menyimpang dari hukum Islam. Demikian pula, sengketa hukum yang menyangkut pernikahan, perceraian, kewarisan, tidak mendapat penyelesaian melalui lembaga peradilan Islam sehingga pada saat itu terjadi berbagai macam kasus yang belum bias diselesaikan oleh lembaga yang dibuat oleh Belanda.

Permasalahan lain yang terjadi dalam kekosongan lembaga peradilan di Bima adalah kasus yang menyangkut status hukum benda wakaf. Kasus perwakafan ini telah mengalami pergeseran menuju kasus baru, dimana tanah milik yang telah di wakafkan dikuasai oleh pewakaf dan selanjutnya diperjual belikan lagi. Setelah kasus perwakafan belum selesai, menyusul kasus gugat menggugat di antara ahli

waris. Kasus demikian berlanjut secara turun temurun tanpa memperoleh suatu ketetapan hukum (Abdullah, 2004: 159).

Pada masa sebelum tahun 1908 kepengurusan mesjid dipusatkan pada Mahkamah Syar'iyah. Setelah adanya campur tangan Pemerintah Kolonial Belanda di Bima, mesjid lepas dari perhatian pemerintah Kesultanan sehingga lepas dari pemeliharaan atau kepengurusan. Bahkan penggunaan mesjid cenderung menjauh dan hanya sekedar untuk sholat Jum'at saja. Mesjid tidak lagi dipergunakan sebagai tempat bermusyawarah dan pengajian. Masalah lain yang muncul adalah adanya perebutan hak untuk dapat menguburkan keluarga atau anak keluarga di halaman mesjid. Keadaan ini menambah jumlah kuburan di lingkungan mesjid sehingga dapat menumbuhkan suasana yang menakutkan dan menjadi salah satu sebab masyarakat menjauh dari mesjid (Abdullah, 2004:134).

KESIMPULAN

Selama abad ke-19, pemerintah Belanda melakukan perjanjian dengan Sultan-sultan Bima yaitu Sultan Ismail, Sultan Abdullah, dan Sultan Abdul Azis. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menjamin kepentingan dan monopoli perdagangan pemerintah Belanda. Intervensi Belanda di Kesultanan Bima ini mencapai klimaksnya pada masa Sultan Ibrahim. Pada masa ini, pemerintah Belanda berhasil menguasai Kesultanan Bima melalui perjanjian *Lange Contract* (Plakat Panjang).

Lange Contract (Plakat Panjang) ini Belanda memberlakukan peraturan pajak dan sekaligus menguasai wilayah Kesultanan Bima sehingga perjanjian ini sangat merugikan Kesultanan Bima. Perjanjian tersebut menjadi sebab terjadinya perlawanan rakyat Ngali yang anti terhadap penjajah Belanda atau orang kafir.

Perang Ngali ini semata-mata untuk mempertahankan adat istiadat, agama dan kemerdekaan yang dimiliki oleh rakyat Bima.

Perang Ngali terjadi antara pemerintah kolonial Belanda dengan rakyat Kesultanan Bima. Penyebab terjadinya perang Ngali adalah sebagai berikut: Pertama, Perasaan tidak puas terhadap tindakan pemerintah Kolonial Belanda yang memberlakukan berbagai macam peraturan pajak di Kesultanan Bima. Kedua, Kesultanan Bima sebagai bagian dari Hindia Belanda kedaulatannya telah dirampas dengan perjanjian *Lange Contract* (kontrak panjang) pada masa Sultan Ibrahim. Ketiga, hukum adat dan hukum Islam diganti dengan hukum Belanda. Keempat, sistem bea kepala atau belasting ditolak dan dihukumkan haram membayar pajak kepada orang kafir.

Perang Ngali adalah perang sabil, karena perang ini didorong oleh jihad mempertahankan kebesaran Islam di muka bumi. Serangan di Desa Ngali dilakukan dalam 3 tahap, Perang Ngali tahap pertama dilakukan oleh pasukan domestik melawan laskar rakyat Ngali. Serangan tahap pertama ini dimenangkan oleh laskar rakyat Ngali dan sekaligus memberikan keuntungan kepada Belanda. Perang Ngali tahap kedua dimulai pada tanggal 19 Februari 1908. Pertempuran terjadi di sebelah selatan kampung Ngali, mulai kira-kira jam 12.00 siang dan berakhir pada jam 15.45. Serangan tahap kedua ini merupakan serangan yang gagal bagi Belanda karena laskar rakyat Ngali dapat membunuh panglima tentara Belanda. Serangan tahap ketiga dimulai pada bulan Januari tahun 1909. Serangan tahap ketiga ini, Belanda dapat memenangkan perang. Akibat kemenangan pemerintah kolonial, maka di Kesultanan Bima terjadi perubahan undang-undang dan sistem pemerintah Islam diubah menjadi sistem pemerintah Hindia-Belanda. Hal ini juga, diperparah dengan kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang menerapkan kerja paksa dan kerja rodi di Kesultanan Bima.

Perang Ngali di atas, telah menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan rakyat di Kesultanan Bima. Dalam bidang

politik, dengan berakhirnya perang Ngali, maka pemerintah Belanda dengan leluas mulai merealisasikan isi perjanjian yang tercantum dalam *Lange Contract* (plakat panjang) dimana pemerintah kolonial Belanda mengambil kebijakan mengubah undang-undang di Kesultanan Bima. Sistem pemerintahan Islam dirubah menjadi sistem pemerintah Hindia-Belanda. Dalam bidang ekonomi, perang Ngali telah membawah kerugian pada pihak rakyat Bima, baik moril maupun material. Hal ini diperparah dengan kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang menerapkan kerja paksa dan kerja rodi sehingga mengakibatkan kondisi kesejahteraan rakyat Bima merosot. Di bidang agama, perang Ngali telah menjauhkan rakyat Bima dengan kehidupan Islam karena hukum Islam telah dihapus oleh pemerintah Belanda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. A. G. (2004). *Peradilan Agama dalam Pemerintahan Islam di Kesultanan Bima (1947-1957)*. Mataram: Lenggé.
- Ahmad, A. (1992). *Kesultanan Bima dan Keberadaannya*. Bima: Paguyuban La Mbila.
- Amin, A. (1971). *Sedjarah Bima: sedjarah pemerintahan dan serba-serbi kebudajaan Bima*. Kantor Kebudayaan Kabupaten Bima.
- Depdikbud. (1978). *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: Depdikbud.
- Djakariah, Y. (1995). *Sejarah Singkat Perang Ngali*. Naskah tidak diterbitkan.
- Hilir Ismail, M. (1989). *Pengaruh Perang Ngali Bagi Perlawanan Rakyat Bima dan Riwayat Perjuangannya*. Mataram: Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- _____. (1975). *Peranan Bima dalam Penyebaran Agama Islam di Nusa Tenggara*. Jakarta: Institut Keguruan dan Pendidikan Muhammadiyah. *Skripsi yang tidak diterbitkan*.
- _____. (2002). *Para Tokoh Sejarah Lokal Bima dan Riwayat Perjuangannya*. Mataram: Pemerintah Propinsi Nusa

- Tenggara Barat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- _____. (2004). *Pemahaman Kembali Sejarah Bima dan Daerah Lain di Pulau Sumbawa (Suatu Tinjauan Sejarah Lokal)*. Bima-NTB.
- Hugiono & Poerwantana, P.K. (1992). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Juridin, S. (2006). *Islam, Ideologi dan Demokrasi di Bima*. Buku yang belum diterbitkan.
- Mariam, S. (2004). *Hukum Adat Undang-Undang Bandar Bima*. Mataram: Gunung Agung.
- Rahman, S. A. (2006). *Kesultanan Bima: Peranannya dalam Proses Islamisasi di Bima Nusa Tenggara Barat (1630-1742)*. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sjamsuddin, H. (1981). *Perang Ngali dan Perang Sapuraga di Pulau Sumbawa Tahun 1908*. In *Makalah Pada Seminar Sejarah Nasional ke III*, Depdikbud.
- Suyono, R. P. (2003). *Peperangan kerajaan di Nusantara: penelusuran kepustakaan sejarah*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Tayib, A. (1995). *Sejarah Dana Mbojo Bima*. Jakarta: Harapan Masa PGRI.